



Foto: Perumda Air Minum Batiwakkal genjot capaian 25.000 sambungan rumah hingga 2026.



# MENGEJAR MISI BUPATI CAPAI 25 RIBU SR HINGGA 2026

REPORTER: HENDRA IRAWAN

**TANJUNG REDEB-** Air bersih masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, tidak terkecuali warga Kabupaten Berau. Tak ayal, Pemkab Berau menarget Perumda Air Minum Batiwakkal pemasangan 25 ribu sambungan rumah (SR).

**BACA HALAMAN 8**



## Target Tinggi Cabor Bola Tangan di Kejurprov

REPORTER: HENDRA IRAWAN

**TANJUNG REDEB-** Atlet bola tangan Berau, terus mempersiapkan diri turun di Kejurprov Kaltim, yang akan diselenggarakan di Samarinda. Target tinggi pun menjadi motivasi.

Sebab, jika prestasi maksimal didapat, atlet Berau bisa tampil di Pra-PON wakil Kaltim. Rencananya, Kejurprov dan seleksi Pra-PON itu digelar pada 15 Juni mendatang, secara bersamaan.

Ketua pengurus cabang (pengcab) Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Berau Suhadi mengatakan, ingin atlet-atletnya tampil maksimal, agar di Kejurprov bisa raih emas.

“Atlet sudah latihan intensif guna mematangkan persiapan. Karena saat bertanding harus maksimal,” katanya, Minggu (12/6/2023).

Disampaikannya, atlet sudah selesai diseleksi. Adapun jumlah atlet yang diturunkan, 20 orang. Terdiri 10 atlet pria dan 10 atlet perempuan. Mengenai target, dia mengatakan itu menjadi penyemangat atlet-atletnya.



Apalagi, jika melihat background atlet bola tangan Berau di Porprov VII Kaltim 2022 cukup mentereng. Statusnya juara umum, 3 emas, dan 1 perunggu. Hasil ini, menjadi ledakan semangat bagi atlet yang diutus nanti.

“Optimis bisa dapat emas. Apalagi melihat performa di Porprov kemarin, saya kira itu bisa dipertahankan. Bahkan bisa

ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Hanya, satu hal yang menjadi kendala saat ini. Pembiayaan. Pasalnya, anggaran belum turun untuk digunakan atlet mengikuti Kejurprov.

“Harapannya dapat segera keluar. Agar atlet-atlet bola tangan Berau tidak mengalami kendala mengikuti Kejurprov,” pungkasnya. (/)



Foto: PT Berau Coal saat memberikan pelatihan legalitas produk UMKM di Labanan Jaya, Teluk Bayur.

## Dukung UMKM Naik Kelas, Berau Coal Kembali Gelar Pelatihan Legalitas PIRT

REPORTER: SULAIMAN

**TANJUNG REDEB-** PT Berau Coal kembali menggelar pelatihan legalitas produk UMKM Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), di Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Jumat (2/6/2023).

Adapun pesertanya berasal dari beberapa kampung sekitar, seperti Kampung Tumbit Melayu, Bukit Makmur, Labanan Jaya, Labanan Makarti, dan sekitarnya.

Camat Teluk Bayur, Endang Eriani mengatakan, PIRT merupakan syarat minimal untuk izin edar produk UMKM. Baik di Swalayan maupun di toko-toko di ibukota Berau, termasuk di luar daerah.

Namun, yang harus diperhatikan

para pelaku UMKM adalah konsistensi dan kualitas rasa. Jangan sampai, rasa yang dijual membingungkan konsumen, karena rasa yang tidak konsisten.

“Jangan sampai produksinya menjadi membingungkan. Hari ini manis, besok asam, besoknya lain lagi rasanya. Kecuali ada varian rasanya. Jadi harus dibedakan. Karena menjaga mutu rasa itu penting,” ujarnya.

Dirinya juga mengapresiasi pelatihan yang diinisiasi Berau Coal itu. Menurutnya, Berau Coal selama ini telah memberikan perhatian lebih bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya. Salah satunya, melalui pelatihan PIRT yang diselenggarakan itu.

“Terima kasih Berau Coal, karena telah memberikan perhatiannya kepada para pelaku UMKM. Semoga bisa berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat,” katanya.

**BACA HALAMAN 10**

## Kawal Pemilu 2024, Polres Berau Siagakan Tim Siber

REPORTER: HENDRA IRAWAN

**TANJUNG REDEB – Memasuki tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kapolres Berau AKBP Shindu Brahmarya mengaku sudah melakukan beberapa kegiatan dalam meredam terjadinya konflik pada saat perayaan pesta demokrasi Pemilu.**

Seperti yang dijelaskan Sindhu, bahwa dirinya sudah memerintahkan personel untuk bisa melakukan kegiatan yang dapat meredam adanya keseteruan saat Pemilu di tengah masyarakat. Sehingga, pada saat Pemilu nanti keamanan dapat kondusif.

“Kita terus lakukan sistem pendinginan (cooling system). Salah satunya dengan rutin memberikan imbauan terkait dengan Pemilu”.

Ditanya terkait dengan tim siber Polres Berau, perwira berpangkat melati dua itu mengatakan sudah dari jauh-jauh hari tim siber Polres Berau sudah berjalan. Untuk menjelang Pemilu dirinya juga meminta timnya untuk bisa lebih cekatan dalam mengatasi hal-hal yang bisa menimbulkan provokasi di media sosial (medsos).

“Tim siber sampai saat ini masih terus melakukan penelusuran terkait gerak-gerik di medsos, dan nanti akan lebih kita aktifkan lagi pada saat masa Pemilu sudah dekat,” paparnya.

Menurutnya dalam hal ini perlu adanya imbauan. Pasalnya, di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terlebih dahulu diarahkan dengan imbauan dan arahan. Jika hak tersebut tidak juga diindahkan maka akan ada tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

“Ada tingkatannya terkait dengan hukuman ini, tetapi jika memang sudah diberi imbauan maka tindakanlah yang akan dilakukan,” tegas Sindhu.

Sehingga dengan adanya hal ini dirinya

meminta kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Berau agar dapat bijak dalam bermain medsos. Pasalnya, terkadang adanya isu provokasi juga bisa terjadi di dalam medsos tersebut.

“Berhati-hati dan jangan menyebarkan isu hoaks yang membuat panik dan bisa membuat provokasi. Karena saat ini selain pribahasa ‘mulutmu harimaumu’ saat ini juga ada yang namanya ‘jarimu harimaumu,’” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam mencegah konflik di tahun politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau jalin koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Setidaknya kata Kepala Badan Kesbangpol Berau Salim, ada tiga yang pihaknya gandeng yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

“Jadi semua forum tersebut sudah jalan dalam melakukan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat terkait dengan hal-hal yang rawan konflik saat Pemilu,” ujarnya kepada, Senin (5/6).

Meski Pemilu dilakukan pada tahun depan menurutnya, dalam menjaga kondusivitas dari konflik seperti suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menurutnya hal tersebut sudah harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak dini.

“Semua sudah berjalan, dan sudah SK bupatinya karena memang sudah ada aturannya terkait hal tersebut,” paparnya.

Diakui mantan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau ini, bahwa sejauh ini dengan beberapa tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung di Kabupaten Berau masih kondusif.

Meski begitu, upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap terjadinya konflik tetap akan ditingkatkan. Tim kewaspadaan dini akan lebih banyak melakukan pengawasan nantinya terhadap semua proses Pemilu 2024.

“Jadi koordinasi bersama stakeholder akan terus berjalan

untuk menjaga agar tidak adanya konflik dalam setiap kegiatan apapun,” paparnya.

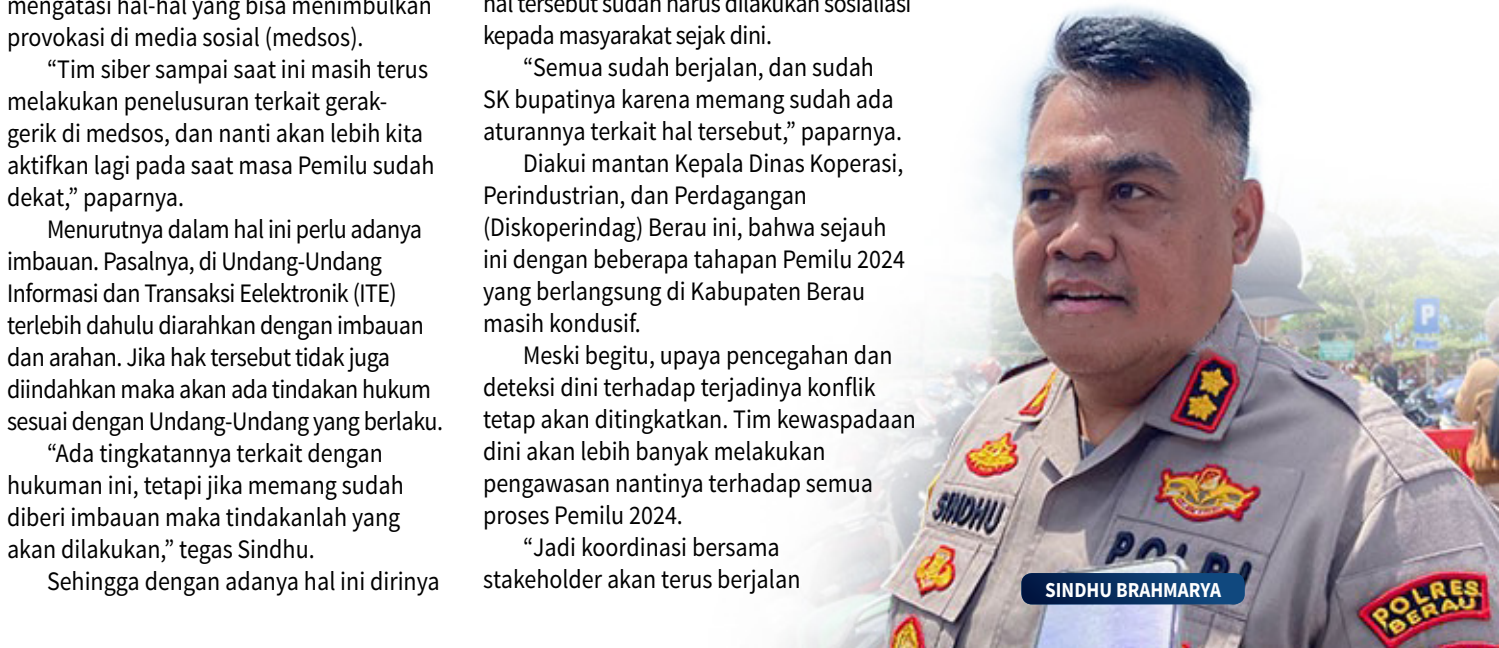
Sehingga, Dia juga tetap berpesan kepada seluruh politisi agar menghindari tindakan saling menyerang dan menjelekkan satu sama lain. Dan yang menjadi perhatian dalam Pemilu juga menurutnya terkait dengan isu sara yang ditakutkan bisa terjadi pada saat Pemilu tersebut.

“Karena pengiringan isu seperti sara dan lainnya sangat mudah untuk ‘digoreng’ sehingga kita terus berusaha untuk menekan agar hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Berau,” harapnya.

Tidak hanya itu saja, menurutnya pengawasan di media sosial juga perlu dilakukan. Pasalnya, di dalam medsos aksi provokasi bisa saja terjadi dan berujung pada terjadinya konflik.

Sehingga menurutnya, dalam menjaga kerawanan tersebut peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga sangat diperlukan.

“Jika di medsos itu yang bisa sering terjadi adalah berita hoaks. Makanya kita juga akan terus memonitor adanya hal tersebut, saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan langsung percaya jika menerima informasi dari media sosial, harus dicari tahu dulu sumbernya,” tandasnya. (\*)



## Mengenal Ayu Winda, Puteri Otonomi Daerah Berau yang Kampanyekan Kakao Berau ke Nasional

REPORTER: SULAIMAN

**TANJUNG REDEB – Ayu Winda Ramadhaniae. Sosok perempuan muda berusia 22 tahun yang memilih berkiprah untuk Bumi Batiwakkal sebagai Puteri Otonomi Daerah. Dirinya terpilih menjadi Puteri Otonomi Berau pada 2023 ini.**

Perlu banget diketahui, pemilihan puteri otonomi merupakan agenda pemerintah daerah anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten (APKASI) se-Indonesia. Ajang yang juga memiliki panggung di nasional. Sama halnya dengan pemilihan putri kebanyakan yang diadakan di daerah.



Namun penyandang putri otonomi agak sedikit berbeda. Punya tugas penting dalam menyuarakan potensi daerah dari segala aspek. Demi membantu pemerintah dalam menjaring investor.

Maka itu, kerjanya cukup politis. Meyakinkan pemilik modal untuk mau berinvestasi di daerah. Melalui kampanye kekayaan daerah. Sehingga kepiawaian dalam bercakap-cakap menjadi modal utama. Selain memiliki paras yang menarik.

Mari kembali mengenal sosok perempuan yang akrab disapa Ayu tersebut. Pada 2023 ini, Ayu terpilih sebagai duta otonomi daerah dalam ajang yang digelar oleh Disbudpar Berau.

Menyingkirkan ratusan peserta. Padahal saat itu ia masih berstatus sebagai pekerja kontrak di Badan Pusat Statistik (BPS) Berau.

“Waktu tau ada pengumuman seleksi Putri Otonomi Daerah, langsung coba daftar. Menurut saya itu menarik,” kata Ayu kepada awak Berau Terkini dalam sesi wawancara eksklusif.

Alumni 2019 SMA Negeri 1 Berau itu, mengatakan status yang ia sandang saat ini bukan tugas yang ‘kaleng-kaleng’. Sebab mesti mengetahui secara

menyeluruh kekayaan daerah. Khususnya pada sektor ekonomi yang tak lejang dimakan zaman.

Berbekal pengetahuan politik semasa berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya Malang, menjadikan dirinya begitu tertarik untuk mengetahui lebih dalam kebijakan pemerintah daerah.

**BACA HALAMAN 11**

Foto:  
Puteri Otonomi  
Daerah Berau,  
Ayu Winda  
Ramadhaniae.



Foto: Kepala Dinas  
Pertanian dan Peternakan  
(Distanak) Berau Jumadi saat  
memeriksa heean qurban yang  
dijual warga.

## Distanak Berau Cek Kesehatan 1.428 Ekor Hewan Qurban

REPORTER: SULAIMAN

**TANJUNG REDEB – Perayaan hari besar umat muslim Idul Adha 1444 H atau dikenal dengan sebutan Lebaran Haji, menyisakan sekira tiga pekan lagi. Sapi dan Kambing yang jadi bagian dari ritual keagamaan pun mulai berdatangan dari daerah tetangga.**

Hewan yang kebanyakan didatangkan dari Pulau Selebes alias Sulawesi pun telah melalui proses pemeriksaan ketat. Utamanya, terkait kesehatan hewan qurban.

Setiap hewan qurban pun diambil

sampel darahnya. Demi memastikan kesehatan hewan sebelum dibagikan dan dikonsumsi masyarakat pada perayaan Idul Adha nanti.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau Jumadi, menyatakan saat ini sampel darah telah dikirim ke salah satu Laboratorium Peternakan di Kaltim untuk diuji.

“Sampelnya sudah dikirim untuk diperiksa,” kata Jumadi kepada awak media, ditemui beberapa waktu lalu.

Setiap hewan qurban yang masuk ke Berau pun telah melalui proses pemeriksaan dokumen hewan ternak. Dalam dokumen itu dilampirkan data jenis hewan hingga vaksinasi untuk penyakit mulut dan kuku (PMK). Pun hewan yang telah masuk ke Berau bakal lalui masa karantina selama 14 hari.

Pembatasan distribusi hewan qurban

hingga lamanya masa karantina, membuat harga jual hewan mamalia tersebut cukup melambung. Diketahui saat ini harga jual sapi qurban cukup beragam. Mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 125 juta. Tergantung bobot dan jenis hewan qurban.

“Itu demi memastikan kesehatan hewan dan siap untuk dikurbankan,” ujarnya.

Hingga saat ini, sapi qurban di Berau yang berasal dari luar daerah sudah mencapai 1.428 ekor. Angka itu akan terus bertambah lantaran jadwal idul adha yang masih panjang.

“Itu akan terus bertambah. Yang penting dokumennya lengkap dan sudah divaksin PMK,” sebutnya.

Diketahui, pusat karantina hewan qurban di Tanjung Redeb mencapai lima lokasi. Angka itu belum termasuk lokasi karantina yang berada di 12 kecamatan lainnya. (\* /ADV)

## Kolaborasi Pulihkan Geliat Penerbangan yang Hampir Mati Dihantam Pandemi

REPORTER: SULAIMAN

**TANJUNG REDEB – ‘Kembalikan Kejayaan Bandara Kalimantan’ kata itu yang cukup menggam-barkan semangat baru pengelola Badan Layanan Umum (BLU) kelas I di wilayah Utara Kaltim itu. Terseok pasca Pandemi Covid-19 medio 2020-2022 lalu, menjadikan bandara tersebut pun mendapat sorotan.**

Bandara Kalimantan kini menjadi harapan pertumbuhan ekonomi di Bumi Batiwakkal. Sebagai pintu gerbang dalam mewujudkan otonomi daerah. Termasuk juga mensejahterakan publik Sanggam.

Minimnya gerakan pengelola bandara saat masuk era kehidupan normal baru alias new normal pasca pandemi, membuat bandara andalan itu tak disibukkan dengan aktivitas penerbangan. Hanya dua maskapai yakni Citilink dan Wings Air.

Untuk menikmati pelayanan dari dua



Foto: Aktivitas Bandara Kalimantan sebelum pandemi 2020 lalu.

pesawat berbadan kecil itu pun calon penumpang mesti merogoh kocek sampai Rp 1,8 juta untuk ke Balikpapan. Sementara ke Jakarta, harus ditukar dengan uang senilai Rp 3 juta. Angka yang sangat besar untuk penebangan pesawat dengan baling-baling.

Semua keluhan itu diutarakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, dalam agenda rapat koordinasi yang dikemas dalam suasana santai. Bertajuk “coffee afternoon percepatan peningkatan ekonomi dan wisata Kabupaten Berau melalui moda transportasi

udara”. Berhadapan langsung dengan petinggi Bandara Kalimantan hingga Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Kalimantan.

Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan keluhan warganya terkait harga tiket. Bukan saja warga Bumi Batiwakkal, namun juga para pelancong asal luar daerah. “Tiketnya mahal betul pak” kira-kira demikian keluh orang yang bertemu dengannya.

**BACA HALAMAN 12**





Pemasangan itu, dikhususkan di wilayah dengan potensi pelanggan cukup tinggi, serta yang sudah terfasilitasi jaringan air bersih.

Sesuai RPJMD Kabupaten Berau, target itu akan tuntas 2026 mendatang. Setiap tahun pemasangan SR terus berporogres. Adapun target pemasangan 25 ribu itu, dimulai pada 2021 lalu.

Estimasinya, 2021 target 3 ribu SR, 2022 3ribu SR, 2023 4 ribu SR, 2024 5 ribu SR, 2025 5 ribu SR, dan 2026 5 ribu SR dengan total keseluruhan 25 ribu SR.

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman menuturkan, untuk capaian 2021 hingga 2022 sudah melampaui target. Sebab, pada 2021 dan 2022, Perumda berhasil merealisasikan pemasangan 6.403 SR di berbagai wilayah.

“Kalau capaian tahun 2023 sementara berjalan. Belum selesai. Tapi, untuk realisasi target itu sudah sesuai dengan on the track di RPJMD,” jelasnya.

Selain meningkatkan pelayanan dan cakupan air bersih, sesuai program Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas.

Terbaru, Perumda Batiwakkal mengadakan pelatihan ISO 9001:2015, yang digelar pada 7 hingga 9 Juni 2023 lalu. Acara ini bertujuan meningkatkan SDM pegawai Perumda, agar siap melaksanakan prosedur kerja. Sesuai standar ISO yang telah diakui secara internasional.

“Peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, hanya dapat terpenuhi jika semua

proses kerja di lingkup Perumda Batiwakkal sudah terstandarisasi dengan baik,” tuturnya.

Diterangkan Saipul, dirinya sangat optimis mampu mengejar target 25 ribu SR. Apalagi, jika melihat progres dari tahun ke tahun. Namun, dirinya juga sadar, Bumi Batiwakkal memiliki wilayah yang cukup luas, di mana tidak semua memiliki fasilitas air bersih.

Umumnya, itu disebabkan ketiadaan instalasi pengolahan air (IPA). Ada juga wilayah memiliki IPA, tapi tidak memiliki jaringan pipa air minum. Sekalipun di perkotaan.

“Nah, ini yang menjadi fokus kerja kami. Ingin maksimal dalam memberikan layanan air bersih. Khususnya, yang sudah terfasilitasi IPA di wilayahnya. Sesuai instruksi kepala daerah,” jelasnya.

Untuk itulah, Perumda mengalokasikan anggaran untuk pemasangan jaringan pipa pelanggan. Jika biayanya besar, maka Perumda mencoba mengusulkan pemasangan jaringan itu ke segala arah mata anggaran. Baik itu melalui APBD Pemkab Berau, Pemprov Kaltim, maupun ke Kementerian PUPR.

Saat ini, ada juga wilayah lain yang sedang didorong agar bisa terfasilitasi air bersih. Salah satunya, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Statusnya sebagai wilayah pariwisata, diharapkan dapat menjadi prioritas pemerintah.

“Kami sudah lobi ke kementerian PUPR dan dananya sudah turun untuk pembangunan intakenya. Dan sekarang sudah dikerjakan,” jelasnya.

Hanya kata Saipul, itu harus di follow-

up lagi dengan pemasang jaringan pipa, melalui usulan ke Pemprov dan Pemkab. Jadi kalau tidak bisa ditalangi oleh pemprov, maka pemkab diharapkan bisa menangannya.

Adapun lokasi pembangunan intakenya, dibangun di Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur. Tepatnya di sekitar sungai Begawan. Apabila bisa beroperasi secara optimal, fasilitas ini lah yang akan disambungkan melalui jaringan pipa sampai ke Tanjung Batu.

Pemasangan jaringan pipa ini nantinya, akan di usulkan ke semua tingkatan pengambil kebijakan. Baik itu ke Pemkab Berau, Pemprov Kaltim, hingga Kementerian PUPR RI, atau pemerintah pusat.

“Cara seperti itu biasa kami lakukan. Di Bidukbiduk misalnya. Itu lobinya juga sampai ke pusat. Jadi memang, PDAM ini tidak bisa bekerja sendiri harus lobi sana lobi sini,” katanya.

Di sisi lain, Saipul juga mengakui, beberapa fasilitas IPA yang sudah terbangun ada yang belum maksimal. Khususnya IPA yang belum dikelola oleh Perumda. Sementara, untuk yang menjadi aset Perumda itu sudah tertangani dengan baik.

Seperti IPA yang ada di Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar. Fasilitas itu dibangun DPUPR Berau dan sudah selesai. Hanya, belum jelas apakah akan diambil alih Perumda, atau tetap diserahkan ke masyarakat untuk dilelola.

**BACA HALAMAN 9**



Hanya saja, ketika masyarakat atau pemerintah kampung mengalami kesulitan mengelolanya, Perumda diminta untuk menjalankan operasionalnya. Hal itu pun tidak menjadi masalah bagi Perumda.

Tetapi kata Saipul, sebelum dikelola fasilitas itu harus dilakukan audit lebih dulu. Setelah melakukan audit, banyak kekurangan kekurangan. Dan itu, harus diselesaikan dulu oleh PUPR, baru bisa diambil alih.

“Sebab, jika itu diambil alih syarat produksinya harus sudah sesuai dengan aturan Kemenkes Nomor 92 Tahun 2010. Itu tidak bisa sembarangan pelayanannya. Harus standar,” jelasnya.

Kasus di Tabalar Ulu bukan satu-satunya. Di Kecamatan Kelay juga ada permasalahan serupa. Yang mana fasilitas IPA di sana dikelola oleh masyarakat, namun menjadi kurang maksimal setelah mengalami kerusakan berat.

Pihaknya tidak bisa membantu, lantaran asetnya bukan milik Perumda. Sehingga fasilitasnya menjadi terbengkalai. Hal ini kata dia, menjadi kendala pemerintah dalam mengoptimalkan layanan air bersih ke masyarakat.

“Itu yang kadang-kadang menjadi kendala kami dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. karena itu tidak bisa ditalangi oleh PDAM. Karena bukan kami yang kelola,” ujarnya.

Selain itu, Perumda juga terus berupaya meningkatkan pelayanan air bersih pada pelanggan setianya.

Juga, melakukan sosialisasi rutin setiap pekan melalui siaran pers yang dikelolanya. Tujuannya, agar masyarakat paham mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Terutama dalam rangka mewujudkan layanan prima kepada masyarakat.



“Banyak kesalahan informasi yang diterima masyarakat terhadap Perumda. Bahkan tak jarang dianggap minim program dalam melayani pelanggan, serta merealisasikan program 25 SR,” ujarnya.

Sejauh ini menurutnya, masih banyak masyarakat belum paham tentang Perumda Air Minum Batiwakkal. Apalagi ada ungkapan, bayarnya mahal padahal air tinggal sedot saja. Namun ditegaskannya, pihaknya sudah bekerja luar biasa untuk masyarakat. Hanya masyarakat belum melihat itu.

Memang diakui, masyarakat Berau belum ada pembandingan mengenai harga. Di Kaltim, harga air yang masih yang dipakai Perumda masih paling rendah. Kualitas air juga relatif lebih baik dari PDAM lain. Namun, kurang mendapat apresiasi, terutama dari beberapa pihak.

“Kami khawatir terjadi

kesalahpahaman. Makanya, kami selalu memberikan informasi melalui media sosial yang bisa diakses. Tujuannya, pelanggan tidak salah informasi. Tidak ada misi lain selain itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, di tahun 2022, perusahaan milik daerah ini, harus mensubsidi sekitar Rp200, – per m3. Artinya, pembayaran air yang dilakukan oleh pelanggan sebenarnya belum menutupi biaya produksi per m3.

Kendati harga pokok produksi masih belum tertutupi. Kabar baiknya, di tahun 2022 lalu, Perumda membukukan laba lebih dari Rp1 Miliar.

“Laba itu didapat karena adanya pemasangan sambungan baru. Kami juga berterimakasih kepada pelanggan setia Perumda Batiwakkal yang membayar air tepat waktu,” pungkasnya. (/)



Sementara itu, Community Development PT Berau Coal, Aprita Lestari Harahap mengatakan, tahun ini yang kedua kalinya pelatihan legalitas PIRT di Kecamatan Teluk Bayur. Dirinya berharap, dengan pelatihan itu pelaku UMKM dapat meningkat nilai produknya dan memasarkan hingga ke luar daerah.

“Semoga setelah ini, produk yang dipasarkan mendapat legalitas dari PIRT. Serta, kemasannya juga dapat menjadi lebih baik lebih premium. Dengan begitu, memasarkannya pun menjadi mudah,” jelasnya

Dia juga menyampaikan, pihaknya akan mendukung para pelaku UMKM di Bumi Batiwakkal untuk terus berkembang dan berdaya saing. “Terpenting para pelaku UMKM, dapat lebih serius sehingga produknya menjadi lebih berkembang. Kami, dari Berau Coal juga memiliki konsen pada sektor UMKM, agar para peserta pelatihan itu bisa meningkatkan pendapatan keluarganya,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, Fungsional Industri, Tri Suciati menjelaskan selain dapat menembus pasar, PIRT juga menjadi syarat bagi diperolehnya sertifikatisasi halal. Untuk mengurus hal itu, Pemkab Berau saat ini pun sudah memiliki 4 pendamping.

Terkait sertifikatisasi halal tersebut, untuk tahun 2024 tepatnya pada Bulan Oktober, semua produk UMKM wajib memiliki sertifikatisasi halal. Semua swalayan pun tidak lagi hanya menerima produk yang memiliki PIRT.



“Jadi di swalayan-swalayan itu, hanya menerima produk yang sudah memiliki sertifikatisasi halal. Kalau jual tanpa sertifikatisasi halal, itu ada sanksinya,” terangnya

“Kemudian, kalau kemasannya bagus, juga sudah ada labelnya, bisa mengurus hak intelektual (HAKI). Jadi, Diskoperindag juga memfasilitasi HAKI. HAKI itu berfungsi sebagai perlindungan. HAKI itu ada beberapa macam, yakni hak cipta, hak desain industri, hak merk, dan hak paten,” lanjutnya.

Suciati pun meminta agar para peserta dapat membentuk kelompok UMKM. Pembentukan kelompok UMKM sangat penting agar dana bantuan sosial dan dana hibah dari pemerintah dapat disalurkan dengan mudah.

Terpisah, salah seorang peserta, asal Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah,

Kiki Febriana mengatakan, tujuannya ikut pelatihan untuk mendapatkan sertifikatisasi PIRT. Sebab, selama menjadi pelaku UMKM, produknya hanya dipasarkan di sekitar kampung saja.

Namun, sesekali produknya kerap dipasarkan melalui media sosial. Sementara untuk, dipasarkan ke swalayan dirinya belum berani. “Itu karena produk saya belum ada PIRTnya, jadi belum berani memasarkan ke swalayan maupun ke luar daerah,” katanya.

Tidak lupa, dirinya juga berterima kasih kepada PT Berau Coal yang telah memberikan pelatihan di Kecamatan Teluk Bayur. “Semoga Berau Coal bisa terus mendampingi para pelaku UMKM, hingga mendapatkan legalitas PIRT,” pungkasnya. (ADV/)



“Aku itu anaknya politik banget lah ka. Tertarik kalo sudah ngomongin politik. Makanya waktu ada kesempatan itu, langsung saya ambil,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, dia membeberkan tugasnya saat ini sebagai puteri otonomi daerah. Ayu bilang, di tengah maraknya industri ekstraktif yang berkembang subur di Bumi Batiwakkal, tak lagi memerlukan jasanya.

Anak pertama dari dua bersaudara itu, lebih memilih mengkampanyekan pengembangan industri kakao selain industri pariwisata. Sebab, selain menjaga alam tetap lestari. Industri itu memiliki potensi keuntungan yang sifatnya jangka panjang.

Ia mencontohkan daerah penghasil kakao di Berau, Kampung Merasa, Kecamatan Kelay. Yang mampu ekspor hingga 15 ton ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat, pada Januari 2023 lalu.

“Saya lebih tertarik menyampaikan itu (bisnis perkebunan kakao) kepada orang-orang. Bisnis yang sangat menjanjikan kalau dikelola serius,” sebutnya.

Ke depan, selain memiliki tugas untuk mengampanyekan wisata di Bumi Batiwakkal. Ia bakal menjaga api semangat para pekebun kakao. Meskipun sektor itu kurang dilirik kaum muda, ia yakin seiring perkembangan dunia teknologi perkebunan akan mampu mencuri hati kelompok usia milenial.

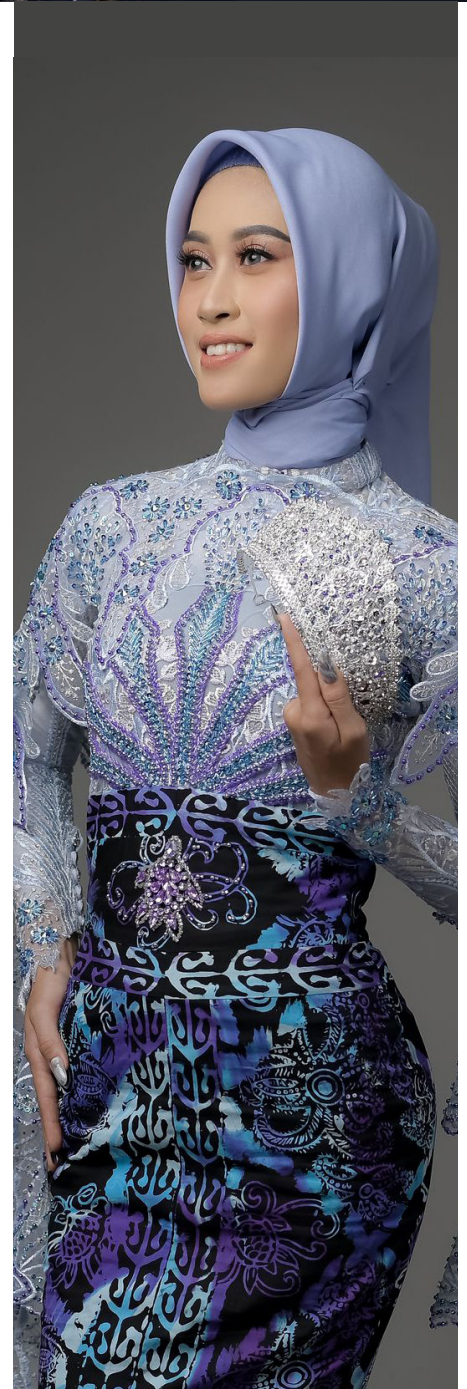
Bahkan, ia berkomitmen untuk membentuk komunitas yang konsen membahas pengembangan industri kakao di Kota Sanggam ini. Tentunya harus melalui dukungan penuh Pemkab Berau.

“Perkembangan dunia teknologi ini sangat dinamis. Tak ada yang tidak mungkin, bila kita yakin,” ujar perempuan kelahiran Berau, 23 Desember 2000 itu.

Terkini, perempuan berbintang Capricorn itu sedang melalui proses pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) mewakili Provinsi Kaltim. Ia lolos masuk semifinal menemani 39 peserta dari kabupaten lainnya, pada seleksi 7-8 Juni 2023 lalu, di Jakarta. Setelah melalui masa karantina dan ujian, dirinya lolos 15 besar semi finalis POI.

Kemudian, pada 20 Juni 2023 nanti dirinya bakal kembali terbang ke Kebumen, Jawa Tengah sebagai tuan rumah grand final POI. Pada event itu bakal dihadiri oleh pejabat penting di Indonesia. Termasuk Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsot.

“Mohon doa dan dukungannya. Inshaallah saya siap untuk bawa nama baik Berau ke kancah nasional,” pinta dia mengakhiri wawancara awak Berau Terkini. (\*)





“Itu suara penumpang kita. Baik yang dari Berau atau luar daerah,” kata Gamalis.

Puluhan destinasi wisata yang mengalami kemajuan drastis dari sisi pengelolaan dan pengembangan, akan dirasa sia-sia. Bila tak ada orang yang mau berkunjung. Meskipun ia tak memungkiri ke Berau dapat diakses lewat darat. Namun waktu dan jarak tempuh, membuat masa termakan banyak. Sementara tujuannya liburan.

Sehingga, syarat utama kata Gamalis, dalam meningkatkan wisata di Berau dengan membenahi jalur penerbangan di Bandara Kalimarau. Dengan mendatangkan pesawat berbadan besar. Dengan kapasitas penumpang capai ratusan dalam sekali penerbangan.

Selain dimanfaatkan oleh warga luar daerah yang ingin liburan. Ia memastikan anak daerah yang berada di luar kota juga ingin menikmati penerbangan yang murah meriah. Sama dengan Kondisi pada Medio 2019 lalu. Yang hanya seharga Rp 450-700 ribu saja.

“Memang butuh hitung-hitungan matang. Mungkin ke depan kita bisa bertemu khusus untuk bahas harga tiket dan penambahan maskapai,” ujarnya.

Kemudian, Ketua DPRD Berau Madri Pani yang juga turut hadir dalam agenda diskusi santai itu. Turut curhat. Selain mengenai harga tiket. Dia juga mengutarakan adanya monopoli harga tiket. Yang menyebabkan tiket penerbangan harus dibeli dengan harga selangit.

“Jangan sampai anggapan ini benar. Kalau dua maskapai yang ada ini seenaknya



saja menentukan harga tiket. Yang rasakan masyarakat loh,” kata Madri tegas.

Ia pun meminta kepada pengelola Bandara Kalimarau dan Otoritas Bandara untuk merumuskan formula khusus untuk menekan harga tiket. Minimal tak jauh angkanya dari harga sebelum pandemi. Agar mimpi yang digantungkan di Bandara Kalimarau dapat dijawab dengan tingkat kunjungan ke Bumi Batiwakkal.

“Kalau tiket ini mahal ya bu. Yakin saya kerja-kerja pariwisata akan mandeg. Datangkan lah pesawat besar ke sini bu. Biar harga tiket tidak semahal ini,” pintanya.

Menjawab itu, Endah Purnamasari Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Kaltim mengatakan, Bandara Kalimarau sangat memiliki potensi untuk mendapatkan kesempatan penambahan maskapai. Sebab standar bandara saat ini sudah memadai

untuk dijadikan landasan pesawat bermesin jet.

Diketahui, medio 1990-an lalu Berau memiliki panjang runway hanya sekitar 600 meter. Yang hanya dapat dilintasi pesawat jenis MAF 506 dengan kapasitas penumpang 5 orang.

Pada periode yang sama dilakukan peningkatan dengan pesawat yang mendarat dengan jenis Cassa dengan Airlines Deraya, Pelita, Asahi, DAS dengan type 100 dan 200 dengan menggunakan landasan lama yang berada tepat di sisi jalan raya Teluk Bayur.

Berkembang lagi pada 2002 lalu. Pesawat yang bisa mendarat jenis ATR 42 milik perusahaan penerbangan yang beroperasi di Kalimarau seperti Deraya, DAS, dan Kal Star.

**BACA HALAMAN 13**



Pada 2008 Kalimarau naik kelas dari kelas IV menjadi Bandar Udara Kelas II. Dengan ditunjuknya Kaltim sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008, aktivitas Bandara Kalimarau semakin pesat.

Kemudian pada 2010, Bandara Kalimarau dilakukan pengembangan pembangunan gedung terminal baru. Pada 2011 landasan pacu dimekarkan, dari 1.850 meter kali 30 meter menjadi 2.250 meter kali 45 meter dan diresmikan pada tahun 2012.

“Dari sisi infrastruktur sudah sangat mendukung. Layak dijadikan landasan pesawat bermesin jet,” ujarnya.

Hanya saja, dia memberi catatan. Bandara Kalimarau tidak dapat dikembangkan melalui kekuatan manajemen internal saja. Dibutuhkan jurus khusus dan partisipasi aktif pemerintah hingga perusahaan swasta pun yang berstatus BUMN.

Dalam strategi memancing maskapai, biasanya dilakukan dengan pembelian kursi langsung. Atau dikenal dengan blockseat. Setiap stakeholder bekerjasama untuk membeli kursi penumpang. Minimal 40 kursi, untuk pesawat dengan kapasitas 100-an penumpang.

Semakin tinggi perjalanan dinas baik pemerintah maupun perusahaan diyakini dapat menarik lirikan penguasa maskapai. Untuk kembali mengoperasikan maskapainya. Setelah aktivitas bandara terlihat sibuk dengan take off maupun landing pesawat.

“Itu alternatif pertama. Pakai skema block seat,” tutur dia.

Setelahnya pemerintah daerah juga memastikan demand alias permintaan penumpang secara mandiri. Bila data-data kebutuhan maskapai dapat terpenuhi, tak menutup kemungkinan dalam waktu singkat Bandara Kalimarau dapat kembali berjaya.



Sebab, dari data yang ia terima. Salah satu perusahaan swasta di Berau memiliki 23 ribu karyawan. Yang setiap minggunya terdapat 50-an karyawan cuti dan berpotensi jadi calon penumpang.

“Angka itu luar biasa. Bisa memenuhi seat yang ada di pesawat. Belum lagi perjalanan dinas 40 OPD yang ada di Berau,” beber dia kembali.

Sementara itu, Kepala Kantor BLU Kalimarau Berau Ferdinan Nurdin, sebagai nahkoda baru mengutarakan komitmennya mengembalikan gairah ekonomi di Bandara Kalimarau.

Ia membeberkan PR besar setelah dirinya ditugaskan oleh Dirjen Penerbangan Udara, Kementerian Perhubungan RI. Salah satunya memaksimalkan penanaman investasi swasta di Bandara yang berstatus sebagai BLU itu.

Dalam waktu dekat ini, ia memastikan bakal ada perusahaan penerbangan helikopter yang bakal investasi di Bandara Kalimarau. Yakni Whitesky Aviation. Dengan mengukur kebutuhan penerbangan darurat yang langsung mengirimkan penumpang dengan jarak menengah.

“Saya miliki prinsip gerak cepat dan terukur. Tidak bisa kerja lambat. Karena perubahan di Bandara ini harus cepat,”

ucap mantan Kepala Bandara di Kota Baru, Kalimantan Selatan itu.

Ia menargetkan aktivitas ekonomi di Bandara Kalimarau kembali menggeliat dalam masa 100 hari kerja. Mengembalikan citra Bandara Kalimarau untuk kembali mendapatkan gelar ‘The Best Airport’ selama lima tahun ke belakang. Yang terakhir didapatkan pada 2019 lalu.

“Saya yakin dengan SDM yang ada di Bandara Kalimarau. Teman-teman saya orang yang punya pengalaman. Dukung dan doakan saja kami,” sebut dia.

Dia juga menerangkan kembali ihwal dukungan pemerintah. Demi kembali menggeliatkan sektor wisata di Berau. Setiap titik destinasi mesti memiliki konektivitas yang memadai. Dalam hal ini terkait infrastruktur menuju lokasi wisata.

Sebab dari situ dapat mengundang gairah wisawatan untuk datang dan kembali berwisata di Berau. Tak menutup kemungkinan dari cara itu pula bakal meningkatkan demand di sektor penerbangan udara.

“Ini butuh kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang apik antara stakeholder. Kami siap dilibatkan dalam agenda-agenda strategis pemerintah,” tegas dia. (\*)